

POLA PEMILIKAN LAHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA BERBAGAI DAERAH DENGAN KONDISI PENGAIRAN YANG BERBEDA

Oleh :

Budi Santoso ¹⁾
Hermanto ¹⁾

Abstrak

Pola distribusi pemilikan lahan mencerminkan pola pemerataan salah satu faktor produksi pertanian yang vital. Untuk lahan dengan kondisi irigasi yang baik akan semakin kompleks permasalahannya karena nilai lahan akan semakin tinggi. Sedangkan produktivitas lahan dan tenaga kerja diperkirakan akan berbeda pula pada kondisi irigasi yang berbeda. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan keadaan pola pemilikan lahan serta produktivitas lahan dan tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan mempunyai pola penyebaran pemilikan lahan yang lebih timpang; tetapi tidak selalu menyebabkan pola penyebaran pendapatan di masyarakat juga lebih timpang. Beberapa faktor seperti sistem hubungan kerja kedokan/ceblok (di Banyuwangi) dan letak geografi yang dekat dengan kota (di Blitar) diduga banyak mempengaruhi pola penyebaran pendapatan di masyarakat. Sedangkan daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik, ada kecenderungan produktivitas marginal tenaga kerjanya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa sumbangan relatif tenaga kerja atas lahan sawah pada produksi padi cenderung semakin besar pada daerah yang kondisi irigasinya relatif lebih baik. Mengenai produktivitas marginal sumber daya lahan cenderung lebih rendah pada daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik.

PENDAHULUAN.

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam usaha tani, di samping tenaga kerja dan modal. Ada dua hal yang merupakan pembatas bagi lahan sebagai sumber daya pertanian. Pertama adalah sifat fisik dan kimia tanah, yang mempengaruhi tingkat kesuburan lahan. Yang kedua adalah jumlah lahan yang tersedia bagi usaha tani akan mempengaruhi produksi total bagi suatu usaha tani.

Di daerah yang padat penduduk seperti di Jawa, lahan telah menjadi faktor produksi yang langka, sehingga sampai batas tertentu lahan merupakan faktor pembatas bagi produksi pertanian; sedangkan di lain pihak tenaga kerja tersedia dalam jumlah relatif banyak. Petani yang mempunyai lahan yang relatif sempit mempunyai kecenderungan

untuk meningkatkan produksinya dengan menggunakan teknologi untuk intensifikasi usaha taninya.

Salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah penggunaan teknologi padat karya. Sudah dibuktikan bahwa teknologi kimiawi, yaitu penggunaan pupuk dan obat-obatan yang didukung oleh sarana irigasi yang baik dan penggunaan bibit unggul, dapat meningkatkan produksi dan produktivitas lahan. Dengan demikian diharapkan bentuk penggunaan teknologi di atas dapat pula meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian.

Lahan di samping mempunyai peran utama dalam ekonomi pertanian, juga mempunyai fungsi sosial. Adanya hubungan hukum antara manusia dengan lahan, menimbulkan hubungan baru antara manusia lainnya atas lahan yang dikuasai oleh salah satu pihak. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan pemindahan hak milik (jual-beli), hubungan sewamenyewa, penyakapan, gadai dan sebagainya.

¹⁾ Staf Peneliti Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.

Hubungan yang berupa pemindahan hak milik dan atas hak menggarap akan menimbulkan pemusatan penguasaan lahan sebagai faktor produksi penting kepada salah seorang atau golongan orang yang mempunyai modal kuat. Keadaan tersebut dari segi ekonomi akan berakibat pada pemusatan pendapatan kepada golongan kecil orang yang kaya. Keadaan demikian akan menyebabkan pola distribusi pemilikan lahan akan semakin timpang. Ketimpangan pola pemilikan lahan tersebut pada umumnya akan berbeda pada daerah yang lahannya kebanyakan tadah hujan dengan daerah yang sarana irigasinya baik serta pengairannya terjamin sepanjang tahun. Kondisi irigasi yang berbeda tersebut relatif akan berpengaruh juga pada produktivitas lahan dan tenaga kerja yang dicurahkan.

Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan keadaan pola pemilikan lahan dan hubungannya dengan tingkat pengeluaran petani serta mengungkapkan pula mengenai produktivitas lahan dan tenaga kerja kaitannya dengan tingkat penggunaan teknologi. Beberapa aspek tersebut akan dilihat pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda. Bahan tulisan ini merupakan hasil penelitian di Jawa Timur tahun 1982.

KERANGKA ANALISA

Model Analisa

Untuk mengkaji faktor sosial ekonomi yang menyebabkan adanya perbedaan pola pemilikan lahan dilakukan pengkajian secara deskriptif dengan analisa tabulasi. Sedangkan untuk menentukan tingkat ketimpangan distribusi pemilikan lahan dan pola distribusi pengeluaran digunakan Indeks Gini (Gini Coefisient), Koefisien Variasi (Coefficient of variation) dan melalui penaksiran distribusi persentase pemilikan lahan atau pengeluaran yang dimiliki masing-masing golongan. Di samping itu, Kurva Loren juga digunakan untuk memperjelas adanya perbedaan antara masing-masing daerah yang dianalisa.

Pendekatan fungsi produksi *Linear Berganda* dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara peubah bebas luas lahan, tenaga kerja,

pupuk N, pupuk P dan obat-obatan dengan *peubah tak bebas* produksi padi sawah. Produktivitas masing-masing masukkan (peubah bebas) di atas dihitung dari turunan parsial pertambahan dari fungsi produksi. Secara matematis hubungan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Fungsi Produksi

$$(1) Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$$

Keterangan:

Y = Produksi gabah kering panen dalam satu musim tanam (ton)

X₁ = Luas lahan sawah yang digunakan dalam produksi padi (ha).

X₂ = Jumlah tenaga kerja yang digunakan (hari - orang).

X₃ = Jumlah penggunaan pupuk N (kwt).

X₄ = Jumlah penggunaan pupuk P (kwt).

X₅ = Jumlah penggunaan obat-obatan (liter).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Keterangan:

a = intersep b₁, b₂, ..., b₅ = koefisien fungsi regresi e = galat

Teori Euler's¹) mengatakan bahwa fungsi produksi yang homogen, didapatkan hubungan:

$$\sum_{i=1}^n X_i \cdot MPX_i = k \cdot f (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Dimana + MPX₁ = produk marginal peubah X₁ (= f'₁ (Y) = b₁) untuk fungsi produksi homogen berderajat satu (k = 1)

$$\sum_{i=1}^n X_i \cdot MPX_i = f (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Berdasarkan fungsi keuntungan (II)

$$II = P \cdot Y - (r_1 X_1 + r_2 X_2 + r_3 X_3 + r_4 X_4 + r_5 X_5)$$

II = Keuntungan usahatani

P = Harga padi persatuan (Rp/kg)

r_i = Harga persatuan masukkan (Rp/kg)

untuk jangka panjang II = 0; maka

$$P \cdot Y = r_1 X_1 + r_2 X_2 + r_3 X_3 + r_4 X_4 + r_5 X_5$$

Berdasarkan r_i = P.MPX_i

$$Y = X_1 \cdot MPX_1 + X_2 \cdot MPX_2 + X_3 \cdot MPX_3 + X_4 \cdot MPX_4 + X_5 \cdot MPX_5 \text{ dan}$$

$$1 = (X_1 \cdot MPX_1 + X_2 \cdot MPX_2 + X_3 \cdot MPX_3 + X_4 \cdot MPX_4 + X_5 \cdot MPX_5) \cdot 1/Y$$

Jadi untuk memperbandingkan sumbangan tenaga kerja (X_1) dengan luas lahan (X_2).

$$\frac{X_1}{Y} \cdot MPX_1 \cdot \frac{X_2}{Y} \cdot MPX_2$$

Jika: $y_1 = \frac{Y}{X_1}$ dan $y_2 = \frac{Y}{X_2}$

maka $\theta = \frac{y_2 \cdot MPX_1}{y_1 \cdot MPX_2}$

θ = ratio sumbangan antara peubah tenaga kerja (X_1) dengan luas lahan (X_2)

y_1 = produktivitas tenaga kerja (kw/h.o)

y_2 = produktivitas lahan (kw/ha).

Besaran θ , yaitu rasio sumbangan tenaga kerja atas lahan, digunakan untuk menganalisa pengaruh penggunaan teknologi terhadap rasio sumbangan tenaga kerja dengan lahan yang dipergunakan. Jika besaran θ meningkat dengan peningkatan teknologi, maka peningkatan teknologi memperbaiki posisi ekonomi tenaga kerja sebagai faktor produksi. Jika besaran θ menjadi relatif kecil, maka hal yang sebaliknya akan terjadi.

Dengan memperbandingkan besaran θ dari suatu daerah ke daerah lain, maka kita dapat melihat daerah mana yang sudah menggunakan teknologi padat tenaga kerja sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan daerah mana yang tingkat penggunaan teknologinya belum memperbaiki produktivitas tenaga kerja.

Untuk menilai apakah sumberdaya telah digunakan secara efisien, maka fungsi π harus maksimum jika

$$\frac{\pi}{X_1} = P \cdot MPX_1 - r_1 = 0$$

$$\frac{\pi}{X_2} = P \cdot MPX_2 - r_2 = 0$$

$$\frac{\pi}{X_2} = P \cdot MPX_2 - r_2 = 0$$

$$\frac{\pi}{X_3} = P \cdot MPX_3 - r_3 = 0$$

$$\frac{\pi}{X_4} = P \cdot MPX_4 - r_4 = 0$$

$$\frac{\pi}{X_5} = P \cdot MPX_5 - r_5 = 0$$

jadi, jika:

- 1) $P \cdot MPX_i = r_i$ — sumberdaya dialokasikan secara optimal
- 2) $P \cdot MPX_i > r_i$ — tingkat penggunaan sumberdaya belum optimal.
- 3) $P \cdot MPX_i < r_i$ — tingkat penggunaan sumberdaya melewati titik optimal

Penentuan Lokasi Penelitian

Pemilihan propinsi yang dijadikan daerah penelitian dilakukan secara proposip. Kriteria pemilihan propinsi yang akan dijadikan daerah penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Propinsi tersebut merupakan propinsi penghasil padi yang potensial
- 2) Propinsi tersebut merupakan propinsi yang padat penduduk.
- 3) Sebagai akibat dari ad 2, di propinsi tersebut lahan telah merupakan faktor produksi yang langka.
- 4) Pola pemilihan dan penguasaan lahan telah menjadi masalah sosial ekonomi.

Jawa Timur, merupakan salah satu propinsi yang memenuhi ke empat kriteria tersebut di atas. Oleh karena itu Propinsi Jawa Timur mendapat prioritas utama untuk dijadikan daerah penelitian.

Selanjutnya, dalam Propinsi Jawa Timur dipilih 3 (tiga) kabupaten sebagai daerah penelitian. Kabupaten Banyuwangi memenuhi kriteria, bahwa sebagian besar areal pertanian di kabupaten tersebut sudah mendapatkan irigasi yang baik. Kabupaten Blitar adalah kabupaten yang sebagian besar areal pertaniannya mendapat irigasi yang sedang. Dan kabupaten Pacitan adalah kabupaten yang sebagian besar areal pertaniannya merupakan sawah tadah hujan.

Dalam satu kabupaten, masing-masing dipilih satu desa yang dijadikan daerah penelitian. Desa penelitian harus memenuhi kriteria seperti pada kriteria propinsi dan

¹⁾ Henderson, JM. and RE. Quandt, 1971. *Micro Economic, a mathematical approach*. 2nd ed. Mc Graw-Hill Kogakusha Ltd. hal. 81-82.

kriteria kabupaten tempat desa tersebut berada. Kriteria tambahan bagi desa contoh, adalah bahwa desa tersebut mempunyai permasalahan pemilikan dan penguasaan lahan yang luas bagi daerah tersebut pada khususnya dan untuk Jawa Timur pada umumnya.

Dalam satu desa, masing-masing dipilih satu kampung, yang dijadikan lokasi penelitian. Kampung tersebut dipilih berdasarkan kriteria umum seperti pada tingkat desa, tetapi juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar warga kampung adalah petani
- 2) Di dalam kampung tersebut tinggal petani penggarap, penyakap (penyewa) dan buruh tani.

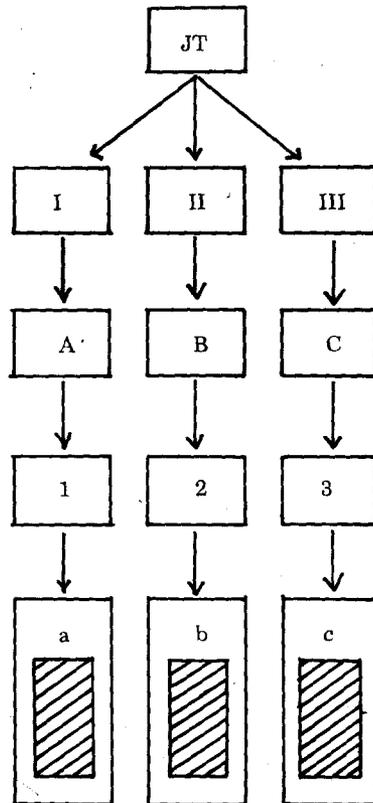
- 3) Kampung tersebut mempunyai penduduk tidak lebih dari 200 KK.
- 4) Dipilih kampung yang penduduknya sebagian besar memiliki lahan yang terletak di dalam desa yang bersangkutan.
- 5) Sebagai syarat tambahan, khusus untuk kampung yang terletak di daerah irigasi baik, dipilih kampung yang sebagian besar penduduknya telah melaksanakan proyek INSUS.

Metoda Pengambilan Data

Data primer mengenai informasi pemilikan dan penguasaan lahan, serta masalah sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan pemilikan dan penguasaan lahan diambil dengan

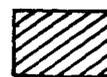
Unit Analisa

1. Propinsi
2. Kabupaten
3. Kecamatan
4. Desa
5. Kampung



Kriteria

1. a. Produsen padi
b. Padat penduduk
c. Lahan yang langka
d. Masalah sosial ekonomi
2. Keragaan Irigasi pertanian (Baik, Sedang, Kurang)
3. Idem Dito
4. Idem Dito + keragaan pemilikan dan penguasaan lahan-lahan yang khas
5. a. Mayoritas petani
b. Warga petani, penyakap buruh
c. Tidak lebih dari 200 KK
d. Lahan terletak dalam desa
e. Program INSUS syarat untuk kampung
1a.



Petani contoh yang diambil secara acak ($\pm 20\%$ dari KK).

Gambar 1. Kerangka Metoda Pengambilan Data.

metoda wawancara. Data ini diambil dengan metoda sensus untuk seluruh rumah tangga (KK) di kampung tersebut.

Data usahatani dikumpulkan untuk menganalisa luaran dan masukan termasuk penggunaan tenaga kerja luar dan dalam keluarga pada tanaman padi musim tanam yang terakhir (saat survey dilakukan). Metoda pengambilan data usahatani adalah metoda survey, dengan acak sederhana sebanyak 20 persen dari rumah tangga petani.

Data dan informasi sekunder diperoleh dari dinas/instansi yang erat atau dipandang relevan dengan obyek penelitian, sedangkan informasi yang bersumber dari "key-informan" juga digunakan dalam penelitian ini.

Struktur Distribusi Pemilikan Lahan.

Terdapat perbedaan mengenai pola pemilikan lahan di ketiga daerah penelitian. Dilihat dari struktur distribusi pemilikan lahan, maka daerah Pacitan relatif lebih rendah tingkat ketidakmerataannya dibandingkan kedua daerah lainnya. Gambaran mengenai hal ini diperlihatkan dalam Tabel 1.

Dengan memakai perhitungan indeks Gini, tingkat ketidakmerataan distribusi pemilikan lahan untuk daerah Pacitan tergolong moderat/sedang,¹⁾ yaitu dengan indeks Gini 0,4524. Sedangkan Blitar dan Banyuwangi tingkat ketidakmerataannya tergolong berat, yaitu dengan indeks Gini 0,6585 untuk Blitar dan 0,7196 untuk Banyuwangi (lihat Tabel 1).

Perhitungan dengan menggunakan koefisien variasi (CV) juga menunjukkan hasil yang konsisten/sejalan dengan indeks Gini, yaitu Pacitan dengan koefisien variasi yang paling kecil (0,8445), menyusul kemudian Blitar dengan koefisien variasi 1,5843 dan Banyuwangi mempunyai koefisien variasi paling besar yaitu 1,8539 (Tabel 1).

Gambaran mengenai pemerataan distribusi pemilikan lahan dapat diungkapkan lebih jelas melalui penaksiran distribusi persentasi pemilikan lahan yang dimiliki masing-masing golongan. Dari perhitungan tersebut untuk daerah Blitar dan Banyuwangi menunjukkan hasil yang konsisten/sejalan dengan indeks Gini maupun koefisien variasi (CV), yaitu tergolong pada tingkat ketidakmerataan yang berat.²⁾ Banyuwangi merupakan daerah yang paling berat tingkat ketidakmerataannya, yaitu golongan 40 persen pemilik lahan dengan pemilikan sempit (terendah) tidak memiliki lahan samasekali sedangkan sebagian besar

Tabel 1. Distribusi luas pemilikan lahan sawah, indeks Gini dan koefisien variasi untuk daerah Pacitan, Blitar dan Banyuwangi, tahun 1982.

Golongan 20% pemilikan lahan	Luas pemilikan lahan sawah (%)		
	Pacitan	Blitar	Banyuwangi
a. Gol. 20% pertama (terendah)	2,73	0,16	—
b. Gol. 20% kedua	8,38	3,74	—
c. Gol. 20% ketiga	15,55	8,77	6,07
d. Gol. 20% keempat	25,94	18,91	21,78
e. Gol. 20% kelima (tertinggi)	47,40	68,42	72,15
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Indeks Gini	0,4524	0,6585	0,7196
Koefisien variasi (C.V)	0,8445	1,5843	1,8539

(72, 15 persen) dari total luas lahan milik hanya dimiliki oleh 20 persen saja dari total pemilik lahan milik lahan (terendah) hanya memiliki 3,9 persen dari total luas lahan milik. Sedangkan untuk Pacitan, termasuk katagori berat yang cenderung ke moderat, yaitu golongan 40 persen pemilikan lahan (terendah) memiliki 11,11 persen dari total luas lahan milik.

Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari kurva Lorenz pada Gambar 2 yang datanya diambilkan dari Tabel 1. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva Lorenz dari distribusi pemilikan lahan untuk daerah penelitian Pacitan adalah yang paling dekat dengan garis diagonal (garis pemerataan) yang berarti tingkat ketidakmerataannya lebih rendah dibandingkan Blitar dan Banyuwangi. Sedangkan kurva Lorenz untuk Blitar lebih menjauhi garis diagonal dan hampir berimpit dengan kurva Lorenz dari Banyuwangi, terutama pada golongan 20 persen pertama (terendah) dan 20 persen (tertinggi). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakmerataan pemilikan lahan antara Blitar dan Banyuwangi relatif hanya berbeda pada golongan 20 persen kedua sampai keempat.

Jika angka Gini mengenai pemilikan lahan dikaitkan dengan keadaan irigasi di suatu wilayah, maka ada kecenderungan bahwa semakin baik sarana irigasi bagi sawah di suatu daerah semakin besar angka Gini pemilikan tanahnya. Dengan perkataan lain semakin baik sarana irigasi semakin timpang pola pemilikan tanah di daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus di Banyuwangi yang mempunyai sarana irigasi baik pola pemilikan lahannya lebih timpang dibanding Blitar apa-

1) *Indeks Gini 0,3 menunjukkan ketidakmerataan yang ringan, 0,4 menunjukkan ketidakmerataan yang moderat/ sedang dan 0,5 ketidakmerataannya berat. Oshima dalam ceramah di LEKNAS tanggal 16 Desember 1982, di dalam Prisma No. 1, Februari 1976, hal. 3-12.*

2) *Apabila bagian dari kelompok rendah 40% adalah 17% atau lebih, maka tingkat ketidakmerataannya tergolong rendah, antara 12% sampai 17% tingkat ketidakmerataannya sedang dan di bawah 12% tingkat ketidakmerataannya berat. Kriteria ini diterbitkan dalam Hollis B. Chenery et al, 1974. Redistribution with Growth. London: Oxford University Press, 1974.*

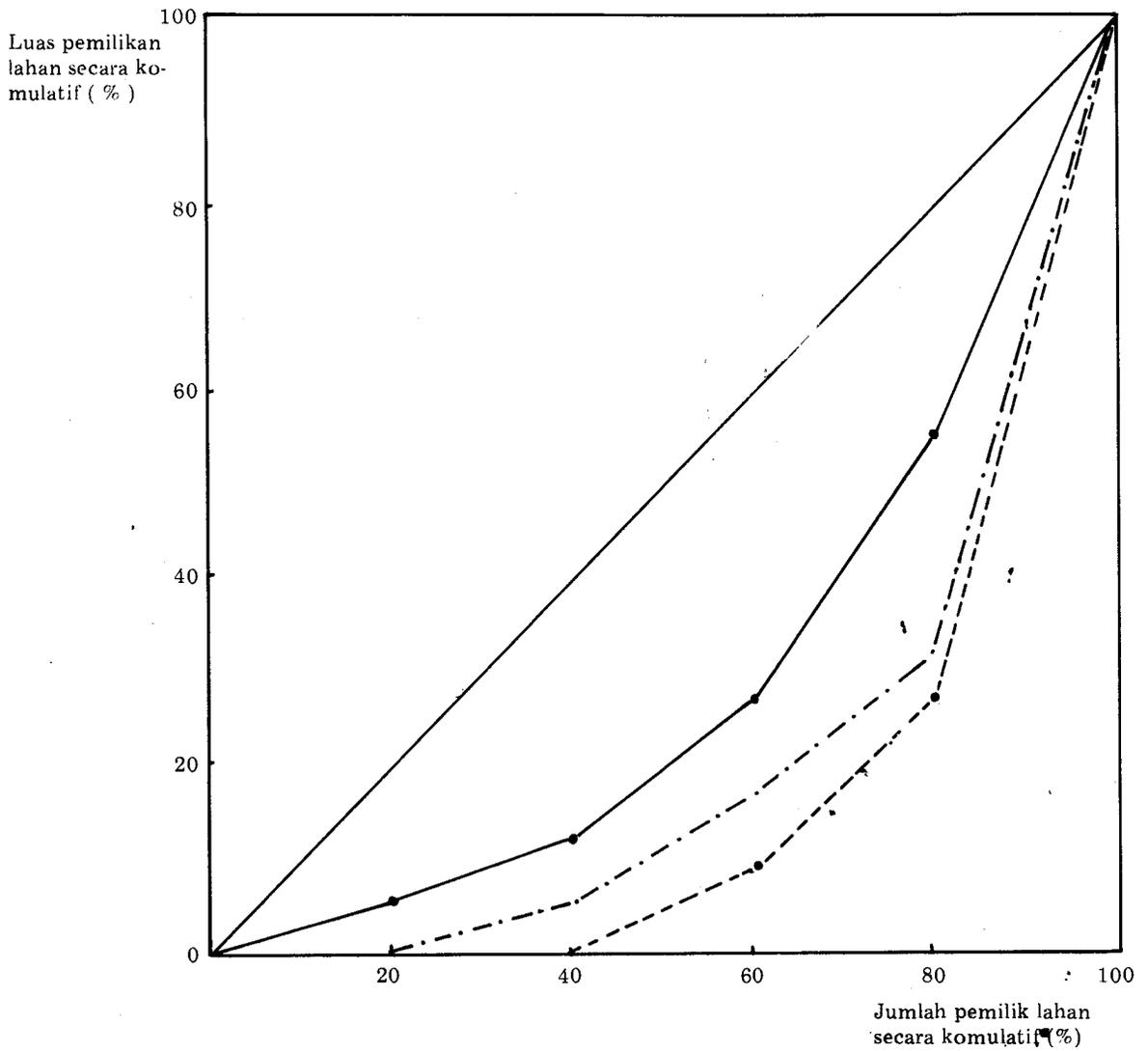
lagi Pacitan yang masing-masing beririgasi sedang dan kurang baik. Keadaan ini dapat diterangkan, bahwa pada sawah yang beririgasi baik mempunyai produktivitas rata-rata yang tinggi. Produktivitas tanah yang tinggi menarik pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya dengan membeli tanah dari petani-petani kecil yang tidak/kurang efisien usaha taninya. Dengan demikian terjadilah akumulasi lahan pada segolongan orang pemilik modal di desa/luar desa. Sedangkan petani berlahan sempit lebih memilih berburuh/menyakap kepada petani pemilik lahan, dan atau mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian.

Struktur Distribusi Pengeluaran

Daerah Pacitan mempunyai distribusi pengeluaran yang tingkat ketidakmerataannya relatif lebih ringan bila dibandingkan dengan Blitar dan Banyuwangi, baik melalui pengukuran dengan indeks Gini, koefisien variasi maupun dengan melalui penaksiran distribusi persentasi yang dimiliki masing-masing golongan. Indeks Gini untuk daerah Pacitan dan Banyuwangi adalah 0,2632 dan 0,3675 yaitu termasuk katagori tingkat ketidakmerataan yang ringan. Sedangkan Blitar dengan indeks Gini 0,4194 tingkat ketidakmerataannya termasuk katagori moderat/ sedang (lihat Tabel 2).

Perhitungan dengan menggunakan koefisien variasi (C V) juga menunjukkan hasil yang konsisten/sejalan dengan indeks Gini, yaitu Pacitan dengan koefisien variasi paling kecil (0,7167), menyusul kemudian Banyuwangi dengan koefisien variasi 0,8243 dan Blitar dengan koefisien variasi yang paling besar, yaitu 1,0831 (Tabel 2).

Gambaran dengan melalui penaksiran distribusi persentasi pengeluaran yang dimiliki masing-masing golongan juga menunjukkan hasil yang sejalan/konsisten dengan indeks Gini maupun koefisien variasi (C V). Pacitan merupakan daerah yang paling ringan tingkat ketidakmerataannya, yaitu golongan 40 persen dengan pengeluaran terendah memiliki 23,04 persen dari total pengeluaran, kemudian menyusul Banyuwangi dengan 19,11 persen dan Blitar dengan 16,25 persen.



- Keterangan** :
- : Distribusi pemilikan lahan untuk daerah penelitian Pacitan
 - . - . - . : Distribusi pemilikan lahan untuk daerah penelitian Blitar
 - : Distribusi pemilikan lahan untuk daerah penelitian Banyuwangi

Gambar 2. Kurva Lorenz dari Distribusi Pemilikan lahan untuk Daerah Penelitian Pacitan, Blitar dan Banyuwangi, tahun 1982.

Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari kurva Lorenz pada Gambar 3 yang menunjukkan bahwa kurva Lorenz dari distribusi pengeluaran untuk daerah Pacitan adalah yang paling dekat dengan garis diagonal (garis pemerataan) yang berarti tingkat ketidakterataannya paling rendah dibandingkan Blitar dan Banyuwangi.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara pola pemilikan lahan dengan pola penyebaran pendapatan masyarakat. Jika pengeluaran merupakan penduga bagi pendapatan masyarakat, maka makin timpang pemilikan lahan ada kecenderungan makin timpang pula penyebaran pendapatan masyarakat. Namun hal ini tidak selalu demikian.

Kasus Pacitan menunjukkan bahwa pada daerah ini pola penyebaran pemilikan lahannya merata yang diikuti oleh pola penyebaran pendapatan yang merata pula. Kasus Banyuwangi menunjukkan bahwa pada daerah yang pola pemilikan lahannya tidak merata terjadi pula pola penyebaran pendapatan yang tidak merata. Keadaan ini benar jika masyarakat di suatu daerah sumber pendapatan utamanya dari hasil sumberdaya lahan (daerah pertanian). Jika penduduk di suatu desa mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar sektor pertanian, artinya ketergantungan sumber pendapatan dari lahannya rendah, maka ada kecenderungan pola pemilikan/penguasaan lahan yang timpang tidak selalu diikuti oleh

pola pengeluaran pendapatan yang timpang pula. Hal ini bisa dilihat dari kasus di Blitar.

Pola Pemilikan Lahan Sawah Dalam Hubungannya Dengan Pola Distribusi Pengeluaran.

Dari perhitungan dengan memakai indeks Gini, koefisien variasi dan penaksiran distribusi persentasi yang dimiliki, masing-masing golongan dapatlah disimpulkan bahwa distribusi pemilikan lahan di ketiga daerah sangat timpang khususnya di Blitar dan Banyuwangi, dimana sebagian besar dari luas pemilikan lahan sawah hanya dimiliki oleh golongan 20 persen pemilik sawah dengan pemilikan luas (tertinggi). Meskipun pemilikan tidak selalu mencerminkan adanya penguasaan dan pemilikan lahan sawah tidak selalu mencerminkan pemilikan lahan secara keseluruhan (termasuk tegal, pekarangan dan lain-lain), namun karena lahan sawah memegang peranan yang dominan, maka dengan adanya ketimpangan struktur pemilikan lahan sawah tersebut memperlihatkan bahwa bagian terbesar sumber produksi petani di desa berada di tangan sebagian kecil anggota masyarakat golongan teratas, sedangkan sebagian kecil sumber produksi di tangan bagian terbesar petani golongan bawah.

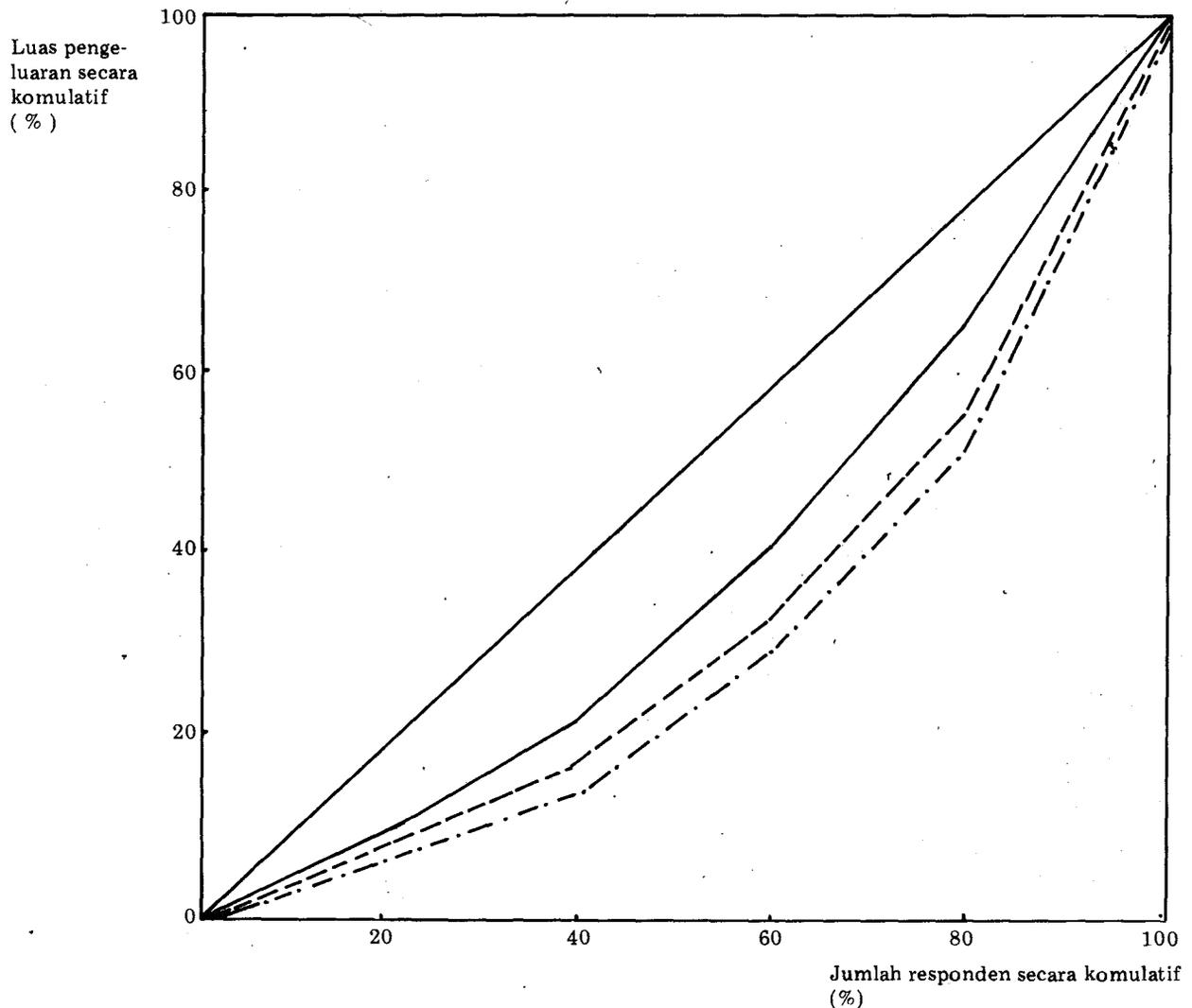
Untuk Pacitan, distribusi pemilikan lahannya termasuk katagori moderat/sedang dan distribusi pengeluarannya termasuk katagori ketidakterataan yang ringan. Hal ini diduga

Tabel 2. Distribusi pengeluaran, indeks Gini dan koefisien variasi (c.v) untuk daerah penelitian Pacitan, Blitar dan Banyuwangi, tahun 1982.

Golongan 20% pengeluaran	Banyaknya pengeluaran (%)		
	Pacitan	Blitar	Banyuwangi
a. Gol. 20% pertama (terendah)	8,74	5,65	7,64
b. Gol. 20% kedua	14,28	10,60	11,19
c. Gol. 20% ketiga	17,76	14,73	14,83
d. Gol. 20% keempat	21,98	20,54	20,36
e. Gol. 20% kelima (tertinggi)	37,24	48,48	45,68
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Indeks Gini	0,2632	0,4194	0,3675
Koefisien Variasi (C.V)	0,7167	1,0831	0,8243

karena adanya pembagian lahan di tahun 1941, yaitu tiap keluarga mendapat jatah yang sama seluas 0,12 Ha. Karena Pacitan merupakan daerah tradisional agraris yang relatif status dan lahannya relatif kurang subur, demikian pula keadaan irigasinya, maka kesempatan penumpukan modal di pedesaan yang bersumber dari hasil pertanian

relatif kurang. Permintaan lahan pertanianpun kurang. Dan konsekwensinya kasus jual beli lahan juga berkurang. Keadaan inilah yang diduga sebagai penyebab kenapa penyebaran lahan yang relatif merata di tahun 1941 bertahan sampai sekarang.



Keterangan :

- : Distribusi pengeluaran dari daerah penelitian Pacitan
- . - . - : Distribusi pengeluaran daerah penelitian Blitar
- : Distribusi pengeluaran daerah penelitian Banyuwangi

Gambar 3. Kurva Lorenz dari Distribusi Pengeluaran untuk Daerah Penelitian Pacitan, Blitar dan Banyuwangi, tahun 1982.

Untuk Blitar, distribusi pemilikan tanahnya termasuk katagori ketidakmerataan yang berat, sedangkan distribusi pengeluarannya termasuk katagori ketidakmerataan yang moderat/ sedang yang cenderung ke berat. Hal ini diduga karena kasus desa di Blitar merupakan daerah di pinggir kota/pusat perkembangan, sedangkan keadaan irigasinya relatif baik dari Pacitan. Baiknya kondisi irigasi mempengaruhi tingginya produksi padi sawah, sehingga permintaan akan lahan di daerah ini juga meningkat. Petani kaya/ pemilik modal akan menginvestasikan modalnya dengan membeli lahan. Oleh karena itu terlihat banyaknya petani tak berlahan dan berlahan sempit (0,01—0,10 Ha), yaitu sebesar 55,56 persen sedangkan petani yang berlahan luas (> 0,601 Ha) hanya 8,81 persen tetapi mereka memiliki 45,51 persen dari total luas lahan milik (lihat Lampiran 1).

Letak geografi yang ada di pinggir kota memungkinkan petani untuk mencari mata pencaharian lain selain di pertanian (usahatani). Hal ini sedikitnya tercermin dari perhitungan korelasi yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara luas pemilikan lahan dan pengeluaran, baik perhitungan secara keseluruhan dengan angka korelasi 0,2509 maupun perhitungan korelasi tiap-tiap bagian. Angka korelasi tersebut paling kecil dibandingkan angka korelasi untuk Pacitan dan Banyuwangi yang membuktikan bahwa karena pengaruh kota yaitu banyaknya penduduk yang bekerja di sektor non pertanian seperti pedagang (23,66 persen), jasa (16,45 persen), tukang (12,08 persen), pegawai negeri (6,68 persen), dan lain-lain (lihat Lampiran 2), maka hubungan antara luas pemilikan dan pengeluaran relatif kecil sekali.

Untuk Banyuwangi, distribusi pemilikan lahannya termasuk katagori ketidakmerataan yang berat, tetapi distribusi pengeluarannya termasuk katagori ketidakmerataan yang ringan. Hal ini diduga karena Banyuwangi merupakan daerah padi sawah yang lahannya relatif subur dan sawahnya beririgasi, sehingga produktivitas lahan relatif tinggi. Akibatnya ada usaha dari petani yang kaya untuk memperluas usahanya dengan membeli lahan dari petani berlahan sempit. Dengan demikian petani kaya semakin banyak memiliki lahan,

dan petani sempit cenderung menjadi buruh-tani/pengedok. Ketimpangan distribusi pemilikan lahan tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar petani adalah tidak memiliki lahan sama sekali sebesar 40,40 persen dan yang terbanyak lainnya adalah petani dengan pemilikan lahan luas (> 0,601 Ha) sebesar 22 persen (lihat Lampiran 3).

Di daerah penelitian di Banyuwangi rata-rata pemilikan lahan adalah 0,41 Ha/rumah tangga (lihat Lampiran 3) yang relatif lebih kecil dibandingkan Pacita, sedangkan pekerjaan yang terbanyak dilakukan adalah pertamina, yaitu 77,34 persen (lihat Lampiran 4). Dengan keadaan lahan yang subur letak geografi yang jauh dari kota/pusat perkembangan, maka petani pemilik kebanyakan menggarap lahannya sendiri (53,16 persen), tetapi berbagai macam pola penguasaan lahan banyak juga dilakukan, yaitu lahan yang digarap orang lain 27,21 persen, yang disewa 8,23 persen dan yang disakap 9,49 (lihat Lampiran 4).

Mengenai ketidakmerataan distribusi pengeluaran yang termasuk ringan, hal ini diduga karena pemilik lahan sempit/tidak memiliki lahan selain banyak yang menjadi buruh tani/pengedok (46,67 persen) juga berusaha menambah pendapatan dari sumber mata pencaharian lain yang lebih besar seperti pedagang (12,83 persen), jasa (3,67 persen) dan lain-lain (lihat Lampiran 4).

Sistem hubungan kerja kedokan/ceblokan di Banyuwangi kelihatannya juga merupakan salah satu sarana kelembagaan yang menunjang pemerataan pendapatan. Dengan sistem kedokan ini boleh dikatakan bahwa seluruh keluarga di suatu desa/kampung mendapatkan kesempatan bekerja pada petani pemilik lahan, dan sifat hubungan kerja ini relatif tetap. Artinya seorang petani pemilik lahan cenderung memakai tenaga pengedok yang tetap dari tahun ke tahun. Jarang sekali pengedok dari luar desa yang datang untuk mengedok di suatu desa. Sebagai konsekuensi dari sistem pengedokan ini adalah bahwa tambahan angkatan kerja bisa ditampung oleh sektor pertanian, karena sistem kedokan mempunyai fungsi sosial yaitu menolong anggota masyarakat yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan di desa.

Produktivitas Lahan dan Tenaga Kerja

Pacitan.

Keadaan produksi padi sawah untuk daerah studi di Pacitan dapat digambarkan melalui fungsi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,02 + 30,940 X_1^{***}) - 0,004 X_2 + 0,062 X_3 + 0,052 X_4 - 1,250 X_5$$

$$R^2 = 0,76756$$

Keterangan

- Y = Produksi gabah dalam kwt
- X₁ = Luas sawah dalam Ha
- X₂ = Tenaga kerja manusia dalam jam kerja
- X₃ = Pupuk Urea dalam kg
- X₄ = Pupuk TSP dalam kg
- X₅ = Obat pemberantas hama dalam l.
- ***)) = Nyata pada tingkat kepercayaan 99 persen.

Produktivitas marginal tenaga kerja dan produktivitas marginal lahan adalah koefisien arah masing-masing untuk X₁ dan X₂. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa produktivitas marginal tenaga kerja = - 0,004 sedangkan produktivitas marginal lahan = 30,99. Produktivitas tenaga kerja yang bernilai negatif dapat diartikan bahwa penambahan tenaga kerja cenderung menurunkan produksi padi sawah. Keadaan ini jarang ditemui di lapang, mengingat sifat faktor produksi dalam usahatani padi yang merupakan faktor produksi perantara, sehingga nilai negatif bagi faktor tenaga kerja dapat diartikan sama dengan nol. Produk marginal tenaga kerja sama dengan nol lebih sesuai dengan kenyataan di lapang, karena di Pacitan jarang petani menggunakan tenaga kerja sewaan (harian), mereka umumnya menggunakan tenaga kerja dalam keluarga yang tidak dibayar dan juga terdapat sistem sambatan.

Besaran θ , dipergunakan untuk menilai sumbangan relatif dari tenaga kerja dibandingkan dengan sumbangan lahan atas produksi padi sawah. Didapatkan nilai θ untuk daerah studi di Pacitan adalah -0,18. Boleh dikatakan tidak ada sumbangan relatif tenaga kerja terhadap sumbangan lahan atas produksi padi sawah. Dengan perkataan lain teknologi yang digunakan dalam usahatani padi sawah di daerah ini tidak memberi peluang untuk meningkatkan sumbangan relatif tenaga kerja terhadap produksi padi sawah.

Keadaan nilai $\theta \approx 0$ merupakan suatu petunjuk bahwa di daerah Pacitan sudah mengalami kejenuhan tenaga kerja di dalam usahatani padi sawah. Dengan perkataan lain lahan merupakan sumberdaya yang amat langka dibanding dengan tenaga kerja manusia. Hal ini dapat ditunjang dengan data luas lahan sawah garapan rata-rata sebesar 0,18 Ha.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tingkat penggunaan teknologi yang rendah (rata-rata pemupukan 160 kg Urea dan 71 kg/Ha TSP), dan luas lahan sawah per usahatani yang sempit, (0,18 Ha) di daerah studi di Pacitan telah mengalami kejenuhan tenaga kerja di dalam usahatani padi pada tingkat rata-rata 238,1 hari orang/Ha. Keadaan demikian juga menunjukkan keadaan pertanian yang subsisten, artinya skala produksi padi sawah tidak memungkinkan untuk menyerap tambahan tenaga kerja luar keluarga yang umumnya harus dibayar/diupah oleh petani pemilik.

Salah satu konsep untuk menganalisa apakah sumberdaya tenaga kerja dan lahan telah digunakan secara optimal atau belum adalah konsep Nilai Produk Marginal. Konsep Nilai Produk Marginal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPM_{X_1} = \bar{P}_Y \cdot PM_{X_1}$$

$$NPM_{X_1} = \text{Nilai Produk Marginal peubah bebas } X_1$$

$$\bar{P}_Y = \text{Harga rata-rata komoditi } Y$$

$$PM_{X_1} = \text{Produk Marginal peubah bebas } X_1$$

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa NPM Tenaga Kerja = 0. Sedangkan upah buruh rata-rata di Pacitan = Rp 79. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan sumberdaya tenaga kerja melewati titik optimal.

NPM lahan sebesar 342. 629,0 Rp/Ha, sedangkan di Pacitan tidak ada kasus penyewaan lahan, atau nilai sewa lahan = 0, artinya sumberdaya lahan belum digunakan secara optimal. Dengan tidak adanya kasus penyewaan lahan ini memperkuat kesimpulan bahwa petani pemilik di Pacitan umumnya mengerjakan lahannya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Blitar

Keadaan produksi padi sawah untuk daerah studi di Blitar dapat digambarkan melalui fungsi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,400 + 18,650X_1^{**}) + 0,003X_2 + 0,044X_3^{***}) + 0,057X_4 - 2,518X_5$$
$$R^2 = 0,78447.$$

Keterangan

- Y = Produksi gabah dalam kwt
X₁ = Luas sawah dalam Ha
X₂ = Tenaga kerja manusia dalam jam kerja
X₃ = Pupuk Urea dalam kg
X₄ = Pupuk TSP dalam kg
X₅ = Obat pemberantas hama
**) = Nyata pada tingkat kepercayaan 99%
***) = Nyata pada tingkat kepercayaan 95%

Berdasarkan fungsi produksi di atas didapatkan bahwa Produk Marginal Tenaga Kerja sebesar 0,003 kwt gabah/jam kerja dan Produktivitas Marginal Lahan sawah sebesar 18,65 kwt gabah/Ha. Besaran θ sebesar 0,27 menunjukkan bahwa sumbangan relatif tenaga kerja manusia di Blitar lebih besar daripada di Pacitan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keadaan irigasi di Blitar yang relatif lebih baik daripada di Pacitan, cenderung memperbesar produktivitas tenaga kerja, sehingga sumbangan relatif tenaga kerja manusia atas lahan usahatani padi di Blitar pun relatif lebih besar bila dibanding dengan di Pacitan. Tingkat penggunaan teknologi kimiawi dalam usahatani padi di Blitar, ialah: pupuk Urea rata-rata sebesar 484,9 kg/Ha, dan TSP rata-rata sebesar 147,6 kg/Ha. Penggunaan teknologi kimiawi ini cenderung meningkatkan produksi padi (PM-Urea = 0,044 kwt/kg dan PM - TSP = 0,057 kwt/kg).

Untuk menganalisa tingkat penggunaan sumberdaya di daerah studi dipergunakan konsep Nilai Produk Marginal (NPM). Diperoleh NPM tenaga kerja sebesar 31,00 Rp/jam, sedangkan upah tenaga kerja rata-rata sebesar 119,73 Rp/jam. Data tersebut menunjukkan bahwa di Blitar penggunaan tenaga kerja telah melewati tingkat yang optimal. Untuk memperkecil resiko kerugian marginal yang

diakibatkan oleh pemberian balas jasa tenaga kerja, maka petani di Blitar umumnya cenderung mempekerjakan tenaga kerja dalam keluarga yang tanpa pemberian upah, di samping mempekerjakan buruh bayaran.

NPM lahan sawah sebesar 192.617,20 Rp/Ha, sedangkan sewa lahan rata-rata sebesar 123.770,83 Rp/Ha, menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya lahan baru pada tarap mendekati titik optimal. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyewaan lahan masih memberikan keuntungan (marginal) bagi petani.

Banyuwangi

Keadaan produksi padi sawah untuk daerah studi di Banyuwangi digambarkan dalam hubungan fungsi produksi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,864 + 17,384X_1 + 0,008X_2^{**}) - 0,054X_3^{**}) + 0,125^{*})X_4 + 6,148^{**})X_5$$
$$R^2 = 0,679.$$

Keterangan

- Y = Produksi gabah dalam kwt
X₁ = Luas sawah dalam Ha
X₂ = Tenaga kerja manusia dalam jam kerja
X₃ = Pupuk Urea dalam Kg
X₄ = Pupuk TSP dalam kg
X₅ = Obat pemberantas hama dalam lt.
**) Nyata pada tingkat kepercayaan 95%
) Nyata pada tingkat kepercayaan 90%.

Dari persamaan fungsi produksi di atas, dapat dihitung produktivitas marginal tenaga kerja sebesar 0,008 kwt gabah/jam kerja dan produktivitas lahan sawah sebesar 17,384 kwt gabah/Ha. Bila dibanding dengan produktivitas tenaga kerja daerah Pacitan dan Blitar, produktivitas tenaga kerja di daerah Banyuwangi-lah yang paling besar. Tetapi sebaliknya produktivitas marginal lahan sawah di daerah Banyuwangi terkecil dari kedua daerah lainnya.

Besaran θ untuk daerah Banyuwangi didapatkan sebesar 0,48. Besaran θ di Banyuwangi terbesar dibanding dua daerah lainnya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada penggunaan teknologi tertentu (penggunaan Pupuk N, P dan obat-obatan), keadaan irigasi

yang baik di Banyuwangi cenderung menaikkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi bahwa dengan teknologi yang ada tersedianya air yang teratur sepanjang tahun dapat meningkatkan produksi padi sawah, dan dengan demikian produktivitas tenaga kerja pun menjadi tinggi pula.

Tingkat penggunaan teknologi kimiawi dapat dilihat dari tingkat penggunaan pupuk N dan P. Rata-rata penggunaan pupuk Urea di Banyuwangi sebesar 304,10 kg/Ha dan TSP sebesar 122,01 kg/Ha. Tingkat penggunaan teknologi kimiawi di daerah Banyuwangi rata-rata lebih rendah dibanding dengan di Blitar. Jadi tingginya produktivitas lahan di Banyuwangi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat penggunaan teknologi kimiawi, tetapi keadaan kesuburan lahan dan keadaan irigasi yang baik diduga mempengaruhi tingginya produktivitas tenaga kerja di daerah Banyuwangi.

Dengan analisa Nilai Produk Marginal, didapatkan Nilai Produk Marginal Tenaga Kerja di Banyuwangi sebesar 89,90 Rp/jam kerja, sedangkan upah kerja rata-rata sebesar 138,43 Rp/jam kerja. Terlihat bahwa Nilai Produk Marginal jauh dibawah upah rata-rata. Keadaan inilah salah satu sebab kenapa petani pemilik di Banyuwangi cenderung mempekerjakan buruh tani dengan sistem ceblok-an. Hal ini dilakukan untuk memberi resiko kerugian marginal akibat penggunaan tenaga kerja.

Jika produksi kotor rata-rata sebesar 41,9 kwt/Ha, produktivitas rata-rata tenaga kerja = 0,048 kwt/jam kerja. Dengan sistem kedokan buruh dibayar 1/5 bagian dari produksi kotor. Maka balas jasa rata-rata untuk pengedok = 0,010 kwt/jam kerja. Atau dengan harga rata-rata gabah sebesar 112,37 Rp/kg, maka balas jasa rata-rata bagi pengedok sebesar 112,37 Rp/kg. Balas jasa pengedok sebesar 112,37 Rp/jam kerja ini lebih mendekati Nilai Produk Marginal sebesar ± 89,90 Rp/jam kerja dibanding upah buruh harian sebesar 138,43 Rp/jam kerja. Untuk sistem kedokan 1/6 balas jasa yang tepat sama, dengan Nilai produk marginalnya yaitu 89,90 Rp/jam kerja. Di Banyuwangi ada sekitar 80 persen kedokan dengan sistem bagi hasil 1 : 6, dan 20 persen dengan bagi hasil 1 : 5.

Nilai Produk Marginal Lahan di daerah Banyuwangi sebesar 195.299,06 Rp/Ha, sedangkan sewa lahan sawah di pasaran rata-rata 146.514,29 Rp/Ha. Ternyata nilai sewa lahan sawah di pasaran masih di bawah nilai produk marginalnya. Keadaan inilah yang mendorong terjadinya penyewaan lahan di Banyuwangi, karena dengan menyewa lahan, penyewa masih mendapatkan keuntungan marginal 48.784,77 Rp/Ha. Dari analisa di atas dapat pula disimpulkan bahwa tingkat penggunaan sumberdaya lahan belum mencapai titik optimal.

Perlu dicatat, bahwa daerah studi di Banyuwangi merupakan wilayah Insus yang telah berkembang dengan baik. Dampak positif dari program Insus di daerah ini sudah mulai terlihat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja dan produktivitas kerja. Dengan perkataan lain, dari kasus yang terjadi di daerah studi, dapat dikatakan bahwa Insus merupakan suatu bentuk teknologi padat karya yang mampu meningkatkan produktivitas kerja.

Kesimpulan

1. Daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan pola penyebaran pemilikan lahannya lebih timpang dan sejalan pula dengan semakin banyaknya petani yang tidak memiliki tanah. Faktor tingginya produktivitas padi sawah di daerah yang beririgasi baik diduga menjadi penyebab terkonsentrasinya lahan pada golongan petani pemilik lahan luas/kerja.
2. Daerah yang pola penyebaran pemilikan lahannya lebih timpang tidak selalu menyebabkan pola penyebaran pendapatan di masyarakat juga lebih timpang. Adanya sistem hubungan kerja kedokan/ceblok-an (Banyuwangi) dan letak geografi yang dekat dengan perkotaan (Blitar) diduga banyak mempengaruhi pola penyebaran pendapatan di masyarakat.
3. Daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan produktivitas marginal tenaga kerjanya lebih tinggi, yaitu 0,8 kg/jam kerja di Banyuwangi kemudian berturut-turut 0,3 kg/jam kerja di Blitar dan 0,0 kg/jam kerja di Pacitan. Pada

Lampiran 1. Jumlah Petani dan Luas Pemilikan Lahan Sawah Menurut Golongan Luas di Daerah Blitar, tahun 1981

Golongan luas (Ha)	Jumlah petani		Luas lahan milik		Rata-rata
	Jumlah	%	Jumlah	%	
0,601	23	8,81	23,99	45,51	1,04
0,401 - 0,60	15	5,75	7,43	14,09	0,49
0,201 - 0,40	33	12,64	9,22	17,49	0,28
0,101 - 0,20	45	17,24	6,81	12,92	0,15
0,01 - 0,10	104	39,85	5,258	9,97	0,05
0,0	41	15,71	0,002	0,02	0,00005
Total	261	100,00	52,71	100,00	0,20

umumnya sumberdaya tenaga kerja dipergunakan melewati titik optimalnya kecuali di Banyuwangi tenaga kerja dengan sistem kedokan dipergunakan pada titik optimalnya.

4. Sumbangan relatif tenaga kerja atas lahan sawah pada produksi padi cenderung lebih besar pada daerah yang irigasinya relatif lebih baik; yaitu berturut-turut nilai di Banyuwangi 0,48, di Blitar 0,27 dan di Pacitan 0,00. Dengan perkataan lain teknologi yang dipergunakan di daerah Banyuwangi (ditunjang dengan program insus) adalah teknologi yang mempunyai produktivitas tenaga kerja tertinggi.
5. Pada daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan produktivitas marginal sumberdaya lahannya lebih rendah, yaitu berturut-turut di Pacitan 30,94 kwt/ha, Blitar 18,65 kwt/ha dan di Banyuwangi 17,38 kwt/ha. Sedangkan NPM lahan sawah pada umumnya masih dibawah nilai sewa di pasaran bebas.

Lampiran 2. Jenis Pekerjaan Utama Dari Rumah Tangga Responden Di Daerah Blitar, tahun 1982

Jenis pekerjaan	Jumlah K.K	%
1. Buruh tani perikanan	—	—
2. Buruh tani peternakan	1	0,26
3. Buruh tani pertanian	76	19,54
4. Penggarap	71	18,25
5. Pegawai Negeri	26	6,68
6. Pegawai Swasta	9	2,31
7. Pensiunan	3	0,77
8. Tukang	47	12,08
9. J a s a	64	16,45
10. Pedagang	92	23,66
Jumlah	389	100,00

Lampiran 3. Jumlah Petani dan Luas Pemilikan Lahan Sawah Menurut Golongan Luas di Daerah Banyuwangi, tahun 1981

Golongan luas (Ha)	Jumlah petani		Luas lahan milik		Rata-rata
	Jumlah	%	Jumlah	%	
0,601	55	22,45	77,15	76,08	1,40
0,401 — 0,60	18	7,35	9,33	9,20	0,52
0,201 — 0,40	34	13,88	11,03	10,88	0,32
0,101 — 0,20	18	7,35	3,10	3,06	0,17
0,01 — 0,10	21	8,57	0,80	0,78	0,04
0,0	99	40,40	0	—	0
Total	245	100,00	101,41	100,00	0,41

Lampiran 4. Jenis Pekerjaan Utama Rumah Tangga Responden di Daerah Banyuwangi, tahun 1982

Jenis pekerjaan	Jumlah K.K	%
1. Buruh tani perikanan	—	—
2. Buruh tani peternakan	6	1,00
3. Buruh tani pertanian	280	46,67
4. Penggarap	178	29,67
5. Pegawai Negeri	11	1,83
6. Pegawai Swasta	6	1,00
7. Pensiunan	2	0,33
8. Tukang	18	3,00
9. J a s a	22	3,67
10. Pedagang	77	12,83
Jumlah	600	100,00